

## **ANALISIS TEKS ARTIKEL KORAN MAHASISWA INDONESIA PENILAIAN PKI SEKARANG TERHADAP KAUM TENGAH OLEH SOE HOK GIE DENGAN MENGGUNAKAN TEORI JURGEN HABERMAS**

**Marzius Insani<sup>1</sup>, Muharsyam Dwi Anantama<sup>2</sup>, Syam Agung Yudistira<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Pendidikan Sejarah, Universitas Lampung

<sup>2</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung

[marzius.insani@fkip.unila.ac.id](mailto:marzius.insani@fkip.unila.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis teks artikel koran *Penilaian PKI Sekarang terhadap Kaum Tengah* karya Soe Hok Gie menggunakan teori kritik intelektual Jurgen Habermas. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik Gie merepresentasikan tindakan komunikatif yang mempertahankan ruang publik rasional di tengah dominasi ideologi Demokrasi Terpimpin, melalui tiga dimensi: kritik substantif terhadap monopoli wacana PKI, penggunaan *Mingguan Mahasiswa Indonesia* sebagai saluran alternatif, serta respons negara berupa polarisasi politik yang mengekang kebebasan intelektual. Tulisan Gie membuktikan bahwa kolonisasi ruang publik pada era Demokrasi Terpimpin dilembagakan melalui regulasi yang secara sistemis mereduksi pluralisme intelektual.

**Kata Kunci:** artikel koran; demokrasi terpimpin; ruang publik; Soe Hok Gie; teori Habermas

### **Abstract**

*This study aims to analyse the text of the newspaper article 'The PKI's Current Assessment of the Centrists' by Soe Hok Gie using Jürgen Habermas's theory of intellectual criticism. The method employed is historical research using a qualitative approach. The research findings indicate that Gie's criticism represents a communicative act that upholds the rational public sphere amidst the dominance of the Guided Democracy ideology, through three dimensions: substantive criticism of the PKI's discourse monopoly, the use of *Mingguan Mahasiswa Indonesia* as an alternative channel, and the state's response in the form of political polarisation that curtails intellectual freedom. Gie's writings demonstrate that the colonisation of the public sphere during the Guided Democracy era was institutionalised through regulations that systematically reduced intellectual pluralism.*

**Keywords:** newspaper articles; guided democracy; public sphere; Soe Hok Gie; Habermas's theory

### **Pendahuluan**

Perkembangan kehidupan politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin ditandai dengan semakin kuatnya dominasi negara terhadap ruang publik dan kebebasan berpendapat. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno membangun sistem politik yang berpusat pada konsep Manipol-USDEK dan Nasakom sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara. Dalam praktiknya, sistem tersebut tidak hanya memperkuat posisi presiden sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga melahirkan kontrol politik yang ketat terhadap media massa, organisasi mahasiswa, serta kelompok intelektual yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi negara. Situasi ini menyebabkan ruang diskusi publik mengalami penyempitan dan kritik

terhadap pemerintah sering dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional (Prayitno, 2013).

Dalam kondisi politik yang semakin represif tersebut, kalangan intelektual dan mahasiswa mulai mengambil peran sebagai kekuatan moral yang berusaha menjaga rasionalitas publik. Mahasiswa tidak lagi sekadar diposisikan sebagai kelompok akademik, tetapi berkembang menjadi agen sosial-politik yang kritis terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kesadaran kritis tersebut lahir dari meningkatnya ketimpangan sosial, krisis ekonomi, serta praktik politik yang dianggap semakin menjauh dari prinsip demokrasi. Gerakan mahasiswa kemudian tampil sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi negara yang membatasi kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat (Nasution, 2019).

Salah satu tokoh intelektual muda yang paling konsisten menyuarakan kritik terhadap pemerintah Orde Lama adalah Soe Hok Gie. Melalui tulisan-tulisannya di media massa, catatan harian, forum akademik, dan gerakan mahasiswa, Soe Hok Gie memperlihatkan keberpihakan yang kuat terhadap nilai demokrasi, kebebasan berpikir, dan kepentingan rakyat. Kritik yang disampaikan Gie tidak hanya diarahkan pada persoalan ekonomi dan politik secara umum, tetapi juga pada praktik manipulasi ideologi yang digunakan negara untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan (Gie, 2005).

Salah satu tulisan Soe Hok Gie yang menarik untuk dikaji adalah artikel berjudul *Penilaian PKI Sekarang terhadap Kaum Tengah* yang dimuat dalam koran Mahasiswa Indonesia tahun 1966. Artikel tersebut lahir dalam konteks meningkatnya ketegangan politik pasca-peristiwa G30S dan menguatnya pertarungan ideologi di Indonesia. Dalam tulisan tersebut, Soe Hok Gie menyoroti bagaimana Partai Komunis Indonesia (PKI) memandang kelompok “kaum tengah” sebagai pihak yang tidak sepenuhnya mendukung agenda revolusi ideologis mereka. Kritik Gie memperlihatkan adanya kekhawatiran terhadap praktik pelabelan politik, dominasi ideologi, dan penyempitan ruang dialog yang berkembang pada masa itu (Gie, 2020).

Fenomena tersebut relevan untuk dianalisis menggunakan teori kritik intelektual Jurgen Habermas yang menempatkan kritik sebagai bagian dari tindakan komunikatif dalam ruang publik. Habermas memandang bahwa ruang publik merupakan arena sosial tempat masyarakat dapat berdiskusi secara bebas, rasional, dan terbuka mengenai persoalan bersama tanpa dominasi negara maupun kelompok tertentu. Dalam kondisi demokratis, kritik intelektual berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap kekuasaan agar kebijakan negara tetap dapat dipertanggungjawabkan secara rasional di hadapan publik. Namun, ketika negara atau kelompok ideologis tertentu mulai menguasai media, membatasi kebebasan berpikir, dan

memanipulasi wacana politik, maka terjadi kolonisasi ruang publik yang menyebabkan komunikasi publik kehilangan sifat rasional dan demokratisnya (Habermas, 1962).

Dalam penelitian ini, teori Habermas digunakan melalui tiga pijakan analitik utama. Pertama, analisis kritik substantif, yaitu penelaahan terhadap isi kritik yang disampaikan Soe Hok Gie dalam artikel *Penilaian PKI Sekarang terhadap Kaum Tengah*. Analisis ini diarahkan untuk memahami isu-isu yang dipersoalkan Gie, seperti dominasi ideologi, praktik pelabelan politik, dan penyempitan ruang kebebasan berpikir. Kedua, analisis strategi dan saluran kritik, yakni bagaimana Soe Hok Gie menggunakan media massa, khususnya koran “Mahasiswa Indonesia”, sebagai sarana tindakan komunikatif untuk menyampaikan kritik kepada masyarakat luas. Dalam perspektif Habermas, pemanfaatan media massa menjadi bagian penting dalam mempertahankan ruang publik yang memungkinkan terjadinya wacana rasional di tengah tekanan politik negara (Habermas, 1981).

Ketiga, analisis respons pemerintah terhadap kritik intelektual yang disampaikan Soe Hok Gie. Habermas menjelaskan bahwa respons negara terhadap kritik menunjukkan sejauh mana kekuasaan menghargai prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dalam sistem politik yang represif, negara cenderung merespons kritik melalui kontrol media, manipulasi wacana, maupun pembungkaman terhadap kelompok intelektual kritis. Kondisi tersebut tampak pada masa Demokrasi Terpimpin ketika kritik terhadap pemerintah maupun kekuatan politik dominan sering dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Dengan demikian, ketiga pijakan analitik Habermas tersebut digunakan untuk memahami hubungan antara substansi kritik, strategi penyampaian kritik, dan respons kekuasaan dalam artikel *Penilaian PKI Sekarang terhadap Kaum Tengah* karya Soe Hok Gie (Habermas, 1981).

Penelitian mengenai Soe Hok Gie sebelumnya umumnya lebih banyak membahas perannya dalam gerakan mahasiswa, kritik terhadap Orde Lama, atau pemikiran sosial-politiknya secara umum. Penelitian Rina Lestari (2017) misalnya, menyoroti gerakan mahasiswa angkatan 1966 sebagai kekuatan sosial-politik yang menentang pemerintah Orde Lama, tetapi belum secara spesifik membahas analisis teks tulisan Soe Hok Gie di media massa. Penelitian Dedi Irwanto (2019) membahas pembatasan kebebasan pers pada masa Demokrasi Terpimpin, namun belum mengaitkannya dengan kritik intelektual Soe Hok Gie melalui artikel koran. Sementara itu, penelitian Muhammad Arif (2021) lebih berfokus pada relasi intelektual dan kekuasaan dalam sistem politik otoriter secara umum tanpa menelaah konteks tulisan Soe Hok Gie secara spesifik. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam kajian yang secara khusus menganalisis teks artikel Soe Hok Gie menggunakan perspektif teori Jurgan Habermas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks artikel *Penilaian PKI Sekarang terhadap Kaum Tengah* karya Soe Hok Gie dengan menggunakan teori kritik intelektual Jurgen Habermas. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana substansi kritik dalam artikel tersebut merepresentasikan tindakan komunikatif dan upaya mempertahankan ruang publik yang rasional di tengah dominasi ideologi politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana tulisan media massa digunakan Soe Hok Gie sebagai saluran kritik intelektual terhadap praktik dominasi wacana politik pada masa Orde Lama.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sejarah intelektual Indonesia, khususnya mengenai peran media massa sebagai ruang kritik intelektual pada masa Demokrasi Terpimpin. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai relevansi teori Jurgen Habermas dalam memahami hubungan antara intelektual, ruang publik, dan kekuasaan dalam sejarah politik Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis kritik intelektual dalam artikel koran *Penilaian PKI Sekarang terhadap Kaum Tengah* karya Soe Hok Gie. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna dan konteks politik dalam tulisan tersebut, sedangkan metode sejarah digunakan untuk menempatkan artikel dalam situasi sosial-politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Data penelitian berupa teks artikel *Penilaian PKI Sekarang terhadap Kaum Tengah* yang dimuat dalam *Mingguan Mahasiswa Indonesia* edisi 2 Oktober 1966. Artikel tersebut menjadi sumber primer utama penelitian. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, arsip, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Soe Hok Gie, kondisi politik Orde Lama, dan teori kritik intelektual Jurgen Habermas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah referensi yang berkaitan dengan kritik intelektual, ruang publik, dan dinamika politik Orde Lama. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip artikel koran dan sumber pendukung lain yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga pijakan analitik, yaitu analisis kritik substantif untuk menelaah isi kritik dalam artikel, analisis strategi dan saluran untuk memahami penggunaan *Mingguan Mahasiswa Indonesia* sebagai media kritik, serta analisis respons pemerintah untuk melihat hubungan kritik intelektual dengan kondisi politik dan kebebasan pers pada masa Demokrasi Terpimpin. Analisis data dilakukan melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil data penelitian ini adalah arsip tulisan Soe Hok Gie yang berjudul *Penilaian PKI Sekarang Terhadap Kaum Tengah* yang dimuat dalam *Mingguan Mahasiswa Indonesia* edisi 2 Oktober 1966, halaman 2. Tulisan ini merupakan salah satu analisis kritis Gie terhadap strategi ideologis Partai Komunis Indonesia dalam memonopoli wacana politik nasional pada era Demokrasi Terpimpin.



Gambar 1. Tulisan Soe Hok Gie *Penilaian PKI Sekarang Terhadap Kaum Tengah* Tahun 1966 (Sumber: *Mingguan Mahasiswa Indonesia* 2 Oktober 1966, Hlm 2)

Dalam tulisannya, Gie mengutip dinamika internal PKI sebagai berikut:

*“Politik lunak ini tidaklah diterima begitu saja oleh pimpinan PKI yang lain. Lawan-lawan Aidit dibawah pimpinan Tan Ling Djie Alimin Wikana menjerang Politik Aidit karena mereka melihat bahwa PKI telah meninggalkan tjara-tjara revolusioner dan telah merubah dirinja mendjadi partai burdjuris. Alimin menjatakan bahwa antara tahun 1950–1953 golongan lunak dibawah pimpinan Lukman-Aidit dan Njoto mulai menguasai partai. Dengan theory-theorinja mereka telah mengaburkan perdjjuangan kelas.”*

Pernyataan tersebut dimuat dalam *Mingguan Mahasiswa Indonesia* yang terbit di Bandung sebagai koran kampus yang relatif lebih terbuka dibandingkan media arus utama yang semakin dikendalikan negara pada masa itu (Muzakar, 2019; Gie, 2020). Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran Gie terhadap menguatnya dominasi ideologi tunggal yang tidak memberikan ruang bagi pluralisme pemikiran dan keberagaman pandangan dalam kehidupan politik Indonesia.

## Analisis Kritik Substantif

Substansi kritik Gie dalam tulisan *Penilaian PKI Sekarang Terhadap Kaum Tengah* merupakan salah satu rumusan paling jernih dari filsafat intelektualnya tentang pluralisme. Gie memandang bahwa kehidupan intelektual yang sehat secara fundamental membutuhkan keberadaan berbagai pandangan yang saling bersaing, dan bahwa monopoli atas kebenaran oleh kekuasaan manapun adalah awal dari berakhirnya kehidupan berpikir yang bermakna. Pernyataan ini secara implisit mengkritisi pemerintah Orde Lama yang menggunakan Nasakom sebagai ideologi pemersatu yang memadamkan perbedaan pendapat (Gie, 2020).

Substansi kritik ini memperlihatkan kemandirian intelektual Gie yang tidak terikat pada blok politik manapun. Dalam konteks Demokrasi Terpimpin di mana polarisasi politik antara PKI dan militer semakin tajam, Gie memilih mempertahankan posisi kritis yang independen dengan mengkritisi keduanya ketika keduanya dinilai mengancam kebebasan berpikir. Pilihan ini mencerminkan komitmen Gie terhadap prinsip pluralisme intelektual yang menolak hegemoni ideologi manapun, baik yang datang dari negara maupun dari kekuatan oposisi yang otoriter (Gie, 2020).

Dalam perspektif teori kritis Habermas mengenai ruang publik, tulisan ini merepresentasikan upaya Gie untuk mempertahankan ruang diskusi yang bebas dari dominasi kekuatan ideologis apapun. Bagi Gie, ancaman terhadap kebebasan intelektual tidak hanya datang dari negara, tetapi dari setiap kekuatan yang berupaya memonopoli wacana publik (Habermas, 1962). Substansi kritiknya menegaskan bahwa demokrasi sejati membutuhkan ruang bagi pluralisme pemikiran yang tidak dapat diklaim oleh satu kekuatan ideologis manapun, baik negara, militer, maupun partai politik.

Melalui analisisnya terhadap dinamika internal PKI, Gie secara substantif mengkritisi penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pembentukan aliansi ideologis yang mereduksi pluralisme politik. Pemerintah Orde Lama mengadopsi konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) sebagai formula persatuan yang di permukaan tampak inklusif, namun dalam praktiknya berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang menempatkan PKI dalam posisi istimewa di bawah perlindungan Soekarno. Aliansi antara Soekarno dan PKI ini menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan berupa marginalisasi kelompok-kelompok politik yang tidak masuk dalam kerangka Nasakom, termasuk partai-partai Islam modernis dan kelompok sosialis yang kritis (Gie, 2020).

Kritik Gie secara khusus menyoroti bagaimana persaingan internal PKI menghasilkan doktrin-doktrin yang dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Pernyataan bahwa “golongan

lunak” PKI di bawah Aidit-Lukman telah mengaburkan perjuangan kelas dengan teori-teori mereka menunjukkan kesadaran Gie bahwa ideologi dapat dijadikan alat legitimasi yang fleksibel oleh berbagai kelompok yang menginginkan kekuasaan (Habermas, 1962). Pada periode 1962–1964, PKI berhasil menempatkan kader-kadernya di berbagai posisi strategis dalam birokrasi, media massa, dan organisasi massa, dengan dukungan eksplisit dari Soekarno. Proses ini berlangsung bukan melalui proses demokratis yang terbuka, melainkan melalui manipulasi sistem politik yang memanfaatkan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Arrobi (2020) yang menyatakan bahwa kritik Gie secara konsisten diarahkan pada struktur kekuasaan yang mereduksi kebebasan berpikir, bukan hanya pada aktor-aktor individual. Senada dengan itu, Maxwell (2020) menunjukkan bahwa posisi intelektual Gie berada di luar biner ideologis yang berlaku pada zamannya, menjadikannya suara yang unik dalam lanskap politik Indonesia. Gie mengidentifikasi bahwa monopoli wacana publik yang dihasilkan dari dominasi PKI-Soekarno merupakan ancaman serius bagi kebebasan berpikir dan pluralisme intelektual, sebagaimana dibuktikan dengan semakin sempitnya ruang ekspresi intelektual sepanjang era Demokrasi Terpimpin (Ricklefs, 2018).

### **Analisis Strategi dan Saluran Kritik**

Kutipan Gie tentang PKI dan kaum tengah memperlihatkan strategi yang sangat terkalkulasi dalam memposisikan diri sebagai pengkritik independen yang tidak terikat pada blok politik manapun. Dengan menggunakan analisis multi-target yang mengkritisi PKI sekaligus secara implisit mengkritisi pemerintah, Gie secara strategis menjangkau kelompok intelektual moderat yang mungkin bingung dalam menentukan posisi di antara dua kekuatan ideologis yang dominan. Strategi ini memperkuat posisi independennya sebagai suara ketiga yang menawarkan perspektif yang lebih bernuansa (Muzakar, 2019).

Secara strategis, kutipan ini juga memanfaatkan kondisi polarisasi yang radikal untuk memperlihatkan bahwa ada alternatif di luar pilihan antara hitam dan putih yang ditawarkan oleh dua kekuatan ideologis yang bersaing. Dengan mengidentifikasi dan mengkritisi mekanisme monopoli kebenaran yang digunakan oleh PKI, Gie secara tidak langsung juga mengekspos mekanisme serupa yang digunakan oleh pemerintah, tanpa harus melakukannya secara langsung yang lebih berisiko. Strategi analogis ini memungkinkan pembaca untuk menarik kesimpulan sendiri (Nirmala & Zalnur, 2023).

Pemilihan *Mingguan Mahasiswa Indonesia* sebagai saluran publikasi juga bukan tanpa pertimbangan strategis. Koran kampus ini memiliki reputasi sebagai media yang relatif lebih

terbuka terhadap ekspresi intelektual dibandingkan media arus utama yang semakin dikendalikan oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan ruang yang masih tersedia di dalam media alternatif ini, Gie secara strategis mengoptimalkan setiap kesempatan yang ada untuk menyuarkan kritik sebelum ruang tersebut sepenuhnya ditutup oleh mekanisme sensor yang semakin ketat (Habermas, 1962).

Dari perspektif teori ruang publik Habermas, kutipan ini merepresentasikan upaya Gie untuk mempertahankan ruang diskusi yang bebas dari dominasi kekuatan ideologis apapun. Strategi penggunaan saluran analisis intelektual untuk mengkritisi monopoli kebenaran mencerminkan pemahaman Gie bahwa pertarungan yang paling fundamental bukanlah antara ideologi tertentu, melainkan antara kebebasan berpikir dan setiap bentuk hegemoni yang berupaya mengekanginya (Habermas, 1962).

Temuan mengenai strategi saluran kritik Gie ini memperluas dan mengonfirmasi penelitian Kusuma (2021) yang menyimpulkan bahwa gerakan mahasiswa pada era Demokrasi Terpimpin memanfaatkan media kampus sebagai ruang alternatif di tengah pembatasan media arus utama. Lebih jauh, Afkari dan Wekke (2018) telah membuktikan bahwa kemampuan Gie dalam memanfaatkan berbagai saluran ekspresi secara bersamaan menjadi kunci efektivitas kritiknya. Dengan mengintegrasikan analisis sejarah-politik dan analisis wacana dalam satu tulisan, Gie berhasil menciptakan teks yang memiliki daya kritis berlapis yang sulit dibantah secara langsung oleh pihak yang dikritisi (Imantaka, 2020).

### **Analisis Respons Pemerintah Orde Lama**

Tulisan Gie tentang PKI dan kaum tengah memancing respons berupa polarisasi politik yang dipaksakan. Respons pemerintah yang paling relevan terhadap tulisan Gie ini adalah polarisasi politik yang semakin ekstrem yang diciptakan secara artifisial untuk mempersempit ruang bagi suara-suara moderat dan independen. Dengan menciptakan kondisi di mana setiap individu harus memilih antara loyalitas kepada negara atau risiko dianggap sebagai musuh, pemerintah secara efektif mengeliminasi ruang bagi posisi kritis independen seperti yang dipertahankan Gie (Muzakar, 2019).

Kemampuan Gie untuk mengkritisi PKI sekaligus mengkritisi pemerintah secara konsisten sebenarnya mengancam legitimasi narasi pemerintah yang mengklaim sebagai satu-satunya alternatif bagi komunisme. Respons terhadap posisi independen Gie ini adalah upaya untuk mendelegitimasi suara-suara yang tidak mau terlibat dalam polarisasi biner yang diciptakan oleh kekuasaan. Dengan menolak terikat pada blok ideologis manapun, Gie secara

Analisis Teks Artikel Koran Mahasiswa *Indonesia*  
*Penilaian PKI Sekarang terhadap Kaum Tengah* oleh Soe  
Hok Gie dengan Menggunakan Teori Jurgan Habermas  
strategis memperlihatkan bahwa ada ruang ketiga yang selalu ingin disembunyikan oleh pemerintah dari wacana publik (Gie, 2020).

Respons pemerintah terhadap posisi independen Gie terwujud pula dalam bentuk kebijakan polarisasi politik yang diformalkan melalui regulasi. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, yang kemudian dilengkapi dengan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959, secara efektif memaksa seluruh kekuatan politik untuk memilih antara mendukung Nasakom atau dikategorikan sebagai musuh revolusi. Regulasi ini mengeliminasi ruang bagi posisi independen moderat seperti yang dipertahankan Gie, karena secara hukum memaksakan pilihan biner antara kooperasi dengan negara atau marginalisasi politik (Feith & Castles, 2007).

Selain itu, Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin secara eksplisit menolak prinsip oposisi loyal yang merupakan fondasi dari posisi kritis Gie. Ketetapan ini melegitimasi pandangan bahwa kritik terhadap pemerintah dalam kerangka Demokrasi Terpimpin merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat musyawarah yang dianut negara. Dengan demikian, respons pemerintah terhadap kritik Gie yang menolak terikat pada blok ideologis manapun bukan sekadar tindakan represif informal, melainkan telah diformalkan dalam kerangka konstitusional Demokrasi Terpimpin yang menolak keberadaan oposisi yang sah (Muzakar, 2019).

Dari perspektif analisis kekuasaan Bachrach dan Baratz (1962) tentang dua wajah kekuasaan, respons pemerintah dalam konteks ini beroperasi pada level agenda-setting yang membatasi pilihan-pilihan yang dianggap sah dalam wacana publik. Dengan mendefinisikan batas-batas diskusi yang dapat diterima, pemerintah secara efektif membuat posisi independen seperti yang diambil Gie menjadi tidak bermakna secara politik. Respons melalui pembatasan agenda ini merupakan bentuk kekuasaan yang paling halus karena bekerja melalui definisi realitas, bukan melalui larangan langsung.

Temuan penelitian ini memperkuat argumen Arif (2021) yang menyatakan bahwa dalam sistem politik otoriter, negara lebih memilih mekanisme kontrol struktural yang bersifat preventif daripada represi langsung terhadap individu, karena mekanisme struktural lebih efektif dalam menciptakan self-censorship yang melemahkan daya kritis intelektual secara sistemis. Respons pemerintah Orde Lama yang bersifat struktural-regulatif ini sejalan dengan konsep “kolonisasi ruang publik” Habermas (1962), yakni ketika kekuasaan dan kepentingan sistem mulai menginvasi dan mendistorsi logika komunikatif yang seharusnya berlaku bebas dalam ruang publik demokratis. Temuan ini membuktikan bahwa kolonisasi ruang publik pada

era Demokrasi Terpimpin bukan hanya bersifat kultural, tetapi juga dilembagakan melalui instrumen hukum dan regulasi yang mengikat (Badrun, 2022; Habermas, 1981).

## Simpulan

Artikel koran *Penilaian PKI Sekarang terhadap Kaum Tengah* karya Soe Hok Gie merupakan wujud nyata tindakan komunikatif yang berupaya mempertahankan ruang publik yang rasional dan plural di tengah hegemoni ideologi Demokrasi Terpimpin. Melalui kritik substantif terhadap monopoli wacana PKI, Gie menunjukkan bahwa ancaman terhadap kebebasan intelektual bukan hanya datang dari negara, tetapi dari setiap kekuatan yang berupaya memonopoli kebenaran publik. Pemilihan Mingguan Mahasiswa Indonesia sebagai saluran publikasi membuktikan strategi Gie dalam memanfaatkan ruang alternatif yang masih tersedia di luar kendali media arus utama. Respons Orde Lama melalui kebijakan polarisasi politik dan regulasi konstitusional menunjukkan bahwa kolonisasi ruang publik pada era tersebut bersifat sistemis dan dilembagakan, bukan sekadar represi informal. Temuan ini menegaskan relevansi teori Habermas dalam memahami hubungan antara intelektual, ruang publik, dan kekuasaan dalam sejarah politik Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Afkari, & Wekke, I. S. (2018). Pemikiran kritis Soe Hok Gie dalam konteks sosial politik Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 45–60.
- Arif, M. (2021). Relasi negara dan intelektual dalam sistem politik otoriter di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(1), 77–90.
- Arrobi, M. (2020). Kritik intelektual Soe Hok Gie terhadap kekuasaan Orde Lama. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 14(1), 55–70.
- Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962). Two faces of power. *American Political Science Review*, 56(4), 947–952.
- Badrun. (2022). Intelektual kritis dan perannya dalam perubahan sosial. *Jurnal Sosiologi*, 9(1), 21–35.
- Feith, H., & Castles, L. (2007). *Pemikiran politik Indonesia 1945–1965*. LP3ES.
- Gie, S. H. (2005). *Catatan seorang demonstran*. LP3ES.
- Gie, S. H. (2020). Penilaian PKI sekarang terhadap kaum tengah. *Mingguan Mahasiswa Indonesia*, 2 Oktober 1966, hlm. 2.
- Habermas, J. (1962). *The structural transformation of the public sphere*. MIT Press.
- Habermas, J. (1981). *The theory of communicative action*. Beacon Press.
- Imantaka. (2020). Peran media dalam kritik intelektual Soe Hok Gie. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 88–102.
- Kusuma, A. (2021). Represi negara terhadap gerakan mahasiswa. *Jurnal Sosial Politik*, 11(2), 101–115.
- Lestari, R. (2017). Gerakan mahasiswa angkatan 1966 dalam dinamika politik Indonesia. *Jurnal Sejarah*, 6(2), 89–104.
- Maxwell, J. (2020). Pemikiran Soe Hok Gie dalam konteks sejarah Indonesia. *Jurnal Sejarah Asia Tenggara*, 9(1), 12–25.
- Muzakar. (2019). Otoritarianisme Orde Lama dan kritik intelektual. *Jurnal Politik*, 5(2), 55–

Nasution. (2019). Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 8(2), 91–105.

Nirmala, & Zalnur. (2023). Konflik ideologi dalam konsep Nasakom. *Jurnal Sejarah Politik*, 11(1), 20–35.

Prayitno. (2013). Sistem politik Orde Lama. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 2(1), 10–25.

Ricklefs, M. C. (2018). *A history of modern Indonesia since c.1200*. Stanford University Press.